PENDIDIKAN ANAK NELAYAN PESISIR PANTAI DONGGALA

(THE EDUCATION FOR COASTAL FISHERMEN CHILDREN IN DONGGALA)

Amiruddin Masri

Abstrak

Di Indonesia, pendidikan anak nelayan pesisir pantai pada umumnya memiliki masalah yang sama yaitu tingkat pendidikan rendah, kehidupan sosial ekonomi tidak memadai. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk menciptakan serta membentuk kualitas manusia Indonesia unggul serta memiliki daya saing yang kuat. Oleh sebab itu beralasan jika anak nelayan perlu dicarikan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kehidupan mereka.

Kata kunci: pendidikan anak nelayan

Abstract

In Indonesia, the education for coastal fishermen children in general has the same problems that are low level of education and inadequate of socio-economic. Nevertheless, education is one of the key to create and shape the quality of Indonesian as superior as well as strong quality of competitiveness. Therefore, it is reasonable if the fishermen children need to find a learning model that suits their needs and conditions of life.

Keywords: education for fishermen children

PENDAHULUAN

Hari ini atau esok hari, sejak dahulu hingga sekarang pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan yang tidak mengalami perubahan yang berarti. Dilihat dari perspektif antropologi masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat yang lain, seperti masyarakat petani, perkotaan atau masyarakat di dataran tinggi. Perspektif antropologis ini didasarkan pada realitas sosial budaya bahwa masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat lainnya sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumber daya alam yang ada didalamnya. Bahwa pola-pola perilaku kultural masyarakat zona perbukitan berbeda dengan perilaku masyarakat zona pesisir khususnya dalam mengembangkan mata pencaharian, Sulaiman Mamar (2013). Dalam kelompok masyarakat nelayan terdapat beberapa kelas, yaitu kelas pemilik (juragan) dan kelas pekerja (buruh nelayan). Kelas pemilik adalah kelas pemodal dan kelas pekerja adalah buruh nelayan. Kelas pemilik sebagai pemilik modal adalah kelompok yang menguasai faktor produksi seperti alat tangkap ikan, perbekalan, mesin, kapal dan peralatan lainnya yang mendukung nelayan tangkap ikan. Sedangkan kelas pekerja sebagai buruh nelayan yang bekerja kepada juragan membantu dan menyelesaikan segala urusan ketika saat melaut. Kelas pekerja pada umumnya penerima upah dari juragan dan

merupakan kelompok mayoritas dipesisir pantai Donggala, walaupun dari kelompok pekerja ini berupaya memiliki alat produksi tetapi itupun masih sangat tradisional dan hanya sebagai alat produksi yang sewaktu-waktu dapat digunakan.

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktur ekonomi dan politik yang melingkupi si miskin. Struktur ekonomi dan politik yang kurang berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu sehingga menimbulkan hambatan-hambatan dalam akses sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan dan partisipasi dalam pembangunan dan termasuk juga pendidikan. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, oleh sebab itu pendidikan juga merupakan alur tengah dari seluruh sektor pembangunan. Pembangunan dalam keterkaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia yang berarti bahwa pembangunan adalah tidak semata membangun material dan fisik tetapi juga membangun spiritual dan keberhasilan pembangunan dapat tercermin dari sisi ekonomi atau material dan juga sisi spiritual, yang terlihat pada esensi pembangunan bertumpuk dan berpangkal pada sisi manusianya, dengan demikian yang menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai modal pembangunan tidak lepas dari pendidikan sehingga pendidikan merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan

Human Development Index (HDI) merupakan salah satu indikator dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi suatu negara dan sekaligus menggambarkan pembangunan manusia di suatu negara. Dengan informasi angka dan peringkat HDI dapat diperoleh gambaran keadaan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari umur panjang masyarakat disuatu negara dengan mengukur kesehatan dan nutrisi, pendidikan yang diukur dengan tingkat melek huruf, serta standar hidup yang diukur dengan GDP per kapita. Selain usia hidup, pengetahuan diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan 2 indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Tahun 2011, HDI Indonesia berada pada peringkat 124 menurut peringkat Indonesia tersebut, khususnya dibidang pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sekolah-sekolah di Indonesia belum dapat bersaing dalam tingkat antarabangsa. Padahal, pendidikan merupakan sebuah langkah awal bagi generasi penerus bangsa untuk menerima pengetahuan guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu dan siap melaksanakan pembangunan Indonesia di kemudian hari melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa titik terlemah pembangunan Indonesia berada di sektor pendidikan.

Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, saat ini jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 280 juta jiwa dengan perkiraan kasar sebesar 30% berada dibawah usia 15 tahun dan rata rata bersekolah selama 7.2 tahun. Berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS) Jumlah persentase angka putus sekolah atau mengulang yaitu sekitar 16.5% pada anak usia 13 – 15 tahun. Artinya angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2014 – 2015 untuk tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sebanyak 684,967 Anak. Sedangkan buta aksara pun di Indonesia diatas usia 15 tahun, berkisar pada angka 10.21 % atau 15.4 juta jiwa. Untuk meningkatkan HDI tentu saja tidak bisa ditawar lagi perlunya perbaikan sistem serta manajemen kesejahteraan rakyat. Dan pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk menciptakan serta membentuk kualitas manusia Indonesia unggul serta memiliki daya saing yang kuat.

Kabupaten Donggala memiliki pesisir pantai sepanjang 400 km. Penduduk yang masih mengenyam pendidikan pada semua jenjang mencapai 69,268 jiwa dan anak yang tidak bersekolah mencapai 16,047 jiwa. Penduduk yang duduk di bangku SD mencapai 43,655 jiwa. Dari jumlah tersebut, 10.642 siswa melanjutkan ke jenjang SMP atau proporsi mencapai 22.88%. Sedangkan mereka yang melanjutkan ke jenjang SMA mencapai 4.600 siswa atau proporsi mencapai 22.88% dari anak SD. Namun, mereka yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tinggal 471 jiwa atau hanya 1.1% dari anak usia sekolah yang tidak pernah terputus dari SD. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala tahun, 2013).

Selanjutnya data satuan pendidikan Kabupaten Donggala dari 16 kecamatan dapat dilihat pada jadual berikut.

Jadual 1. Jumlah Satuan Pendidikan di Kabupaten Donggala

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah Sekolah	Murid	Guru	Ratio
1	TK	155	3,914	629	6
2	SD/Mi	340	43,169	1,949	22
3	SMP/Mts	102	13,783	1,428	10
4	SLTA/MA	25	5,740	192	30
5	SMK	12	2,662	140	19
Total		634	69,268	4,338	87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Donggala tahun 2013

Kualitas sumber daya manusia antara lain ditentukan oleh mutu dan tingkat pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah, makin tinggi tingkat pendidikan maka makin tinggi pula kualitas sumber daya manusia. Hal ini berpengaruh terhadap cara pikir, nalar, wawasan, keeluasaan, dan kedalaman pengetahuan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan lebih mudah memperoleh kesempatan guna mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang relatif lebih tinggi, dan akan dengan sendirinya dapat memelihara kesehatan yang relatif lebih baik. Dan kesehatan yang baik hanya dapat diperoleh dan ditingkatkan apabila memiliki penghasilan yang mencukup, dan akhirnya pekerjaan dan penghasilan yang cukup ditentukan oleh tingkat pendidikan.

Bagaimanapun kondisi pendidikan nasional saat ini tetapi yang paling utama adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara sudah dijamin oleh hukum yang pasti dan bersifat mengikat. Artinya pihak manapun tidak boleh meringtangi atau menghalangi maksud seseorang untuk belajar dan mendapatkan pelajaran.

Dalam konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebenarnya telah disebutkan dan diakui bahwa anak pada hakekatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogiannya tidak terlibat dalam aktifitas ekonomi secara dini. Namun demikian akibat tekanan kemiskinan, kurangnya animo orang tua terhadap arti penting pendidikan dan sejumlah faktor lain, maka secara suka rela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting. Dari segi pendidikan, anak-anak yang bekerja di sinyalir cenderung mudah putus sekolah, baik putus sekolah karena bekerja terlebih dahulu atau putus sekolah dahulu baru kemudian bekerja. Bagi anak-anak sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang sering kali dinilai terlalu berat, sehingga setelah ditambah tekanan ekonomi dan faktor lain yang sifatnya struktural, tak pelak mereka terpaksa memilih putus sekolah ditengah jalan.

Di Jawa pada masyarakat tani ada beberapa studi yang membahas biaya dan nilai-nilai anak dalam ekonomi rumah tangga dan memberikan data umum tentang umur anak-anak di Jawa yang mulai ikut serta dalam kegiatan produksi serta mengenai macam pekerjaan yang mereka lakukan. Dahuri (2001) dalam bukunya pokok-pokok pembangunan masyarakat desa mencatat, misalnya memperkirakan bahwa anak-anak sejak umur 8 tahun telah diikutsertakan dalam usaha pencarian nafkah yang sederhana dan pekerjaan sehari-hari orang tuanya.

PENDIDIKAN ANAK NELAYAN PESISIR PANTAI

Menurut penelitian masyarakat nelayan di Jawa sama halnya dengan masyarakat tani di Jawa. Di mana istri dan anggota rumah tangga lainnya terlibat dalam menopang ekonomi rumah tangga. Dengan melakukan berbagai pekerjaan seperti berdagang ikan hasil tangkapan suami, berkebun atau membuka warung. Hal tersebut dapat dilihat dari pekerjaan yang dilakukan oleh istri nelayan seperti jual ikan, berdagang, dan lain sebagainya. Sedangkan peran anak membantu ayah bagi anak laki-laki,

dan membantu ibu bagi anak perempuan. Hal tersebut dikarenakan tingginya angka putus sekolah pada keluarga nelayan, sehingga menyebabkan mereka lebih memilih membantu menambah pendapatan ekonomi rumah tangga. Beberapa faktor yang berkaitan dengan pendidikan anak nelayan sebagai berikut:

Kondisi Pelayanan Pendidikan Formal Anak Pesisir

Anak-anak nelayan Donggala umumnya menempuh pendidikan formal yang tersebar di sepanjang pesisir pantai Donggala. Sekolah-sekolah formal dijadikan sebagai sarana pendidikan yang utama untuk mendapatkan ilmu yang lebih layak. Bagi orang tua tidak ada pilihan lain anak sebagai tumpuan harapan untuk membantu mendapatkan nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, di sisi lain anak perlu waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar yang diberikan oleh guru dari sekolah. Orang tua kurang memberi perhatian terhadap perkembangan pendidikan anak di sekolah, walaupun ada itu hanya sekedar bagaimana anak itu pulang dari sekolah kemudian turut serta ikut melaut. Pada kenyataannya, pada usia meningkat remaja anak nelayan mulai di ajak berlayar dan ikut melaut, sehingga mereka jarang sekolah. Kini perlu disadari bahwa kehidupan nelayan memerlukan perhatian yang multi dimensi. Tantangan yang terbesar adalah bagaimana membangun kehidupan nelayan menjadi meningkat kesejahteraannya. Besar kemungkinannya bahwa hal ini dapat dicapai dengan melalui pendidikan yang akan mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat nelayan maupun masyarakat lainnya yang terkait dengan sumber daya kelautan dan pesisir. "Usaha ke arah ini harus bermuara pada peningkatan kemakmuran nelayan, terutama petani kecil dan petani ikan" (Indrawadi: 2009)

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi jumlah faktor, di antaranya ketidak mampuan menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan *independent*, sehingga mutu pendidikan belum dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Distribusi guru tidak merata, pendayagunaannya tidak efisien menyebabkan kinerja guru tidak optimal. Profesionalisme guru masih dirasakan rendah, terutama karena rendahnya komitmen penyiapan pendidik guru dan pengelolaannya. Kinerja guru yang hanya berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan menyebabkan kemampuan siswa tidak berkembang secara optimal dan utuh. Evaluasi kinerja belum ditata dalam suatu sistem akuntabilitas publik, sehingga output pendidikan belum akuntabel dan belum mencapai kualitas pendidikan yang diinginkan.

Program pendidikan *lifskill* merupakan pendidikan yang dapat memberikan bekal ketrampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan proses kerja peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Pada masyarakat pesisir pendidikan kecakapan hidup yang diajarkan adalah berupa cara menangkap ikan yang baik tanpa merusak ekosistem laut.

Pentingnya Pendidikan Anak nelayan pesisir

Bagi para nelayan memang tidak ada pilihan lain, karena pekerjaan yang berhadapan dengan ancaman gelombang laut, ombak cuaca, dan kemungkinan terjadi karam saat akan melaut ke tengah lautan untuk menangkap ikan adalah merupakan pekerjaan turun temurun tanpa pernah belajar sebagai nelayan yang moden. Pada usia meningkat remaja anak nelayan mulai diajak berlayar dan ikut melaut. Anak nelayan turun melaut pada pagi dan sore hari sesuai kondisi yang ditentukan juragan laut. Dengan demikian bahwa masalah sosial budaya yang terdapat pada kehidupan nelayan adalah : 1) Rendahnya tingkat pendidikan. 2) miskin pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pekerjaannya. 3) kurang tersedia wadah pekerjaan informal. 4) kurangnya daya kreativitas, serta belum adanya perlindungan terhadap nelayan dari jeratan para tengkulak. Arif Satria (2003) Mengatakan karena mayoritas masyarakat nelayan adalah kalangan yang berpendidikan rendah yang sering kali tidak mengerti tentang perkembangan prodak perundangan dan tata pemerintahan.

Pola Hubungan Sosial Anak Nelayan

Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan keperluan pokoknya. Sebagian besar penduduk di wilayah pesisir bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan. Masyarakat nelayan akrab dengan ketidak pastian yang tinggi karena secara alamiah sumberdaya perikanan bersifat *invisible* sehingga sulit untuk diprediksi, sementara masyarakat agraris misalnya memiliki sumberdaya yang lebih pasti dan *visible* sehingga relatif lebih mudah untuk diprediksi terkait sosial ekonomi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini maka tidak jarang ditemui karakteristik masyarakat nelayan yang keras, sebagian tempramental dan tidak jarang boros karena ada persepsi bahwa sumberdaya perikanan “tinggal diambil” di laut.

Di sisi lain, dari aspek kepercayaan masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan magik sehingga mereka masih sering melakukan adat yang berkaitan dengan pesta laut, namun demikian bahwa dewasa ini sudah ada sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat tersebut.

KESIMPULAN

Anak nelayan pesisir memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pendidikan formal pada umumnya. Pola pendidikan yang sesuai dengan keperluan Anak nelayan pesisir yang mengutamakan kepentingan pemenuhan hidup yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak dan atau dapat meningkatkan pemenuhan kualitas pembelajaran Anak sehingga diperlukan sebuah sistem pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir. Materi pembelajaran kepada peserta didik, jadwal pembelajaran dan sistem pembelajaran. Dengan demikian bahwa pola pendidikan kecakapan hidup masyarakat pesisir dan model pendidikan dasar yang sesuai atau alternatif model pendidikan dasar perlu menjadi perhatian. Sehingga beralasan jika anak nelayan perlu dicarikan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan keperluan kehidupan mereka.

RUJUKAN

- Dahuri, R.,J.Rais, S.P Ginting, dan M.J. Sitepu (2001) *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu Pradnya*.Paramita: Jakarta
- Indrawadi, (2008), *Rumpon Menetap, Mampu Atasi Masalah Nelayan*, Universitas Bung Hatta: Padang.
- Mamar, Sulaiman. (2013) *Perubahan Kebudayaan Petani Ladang Di Indonesia, Suatu Kajian Pengambilan Keputusan*. Kanisius: Yogyakarta
- Satria, Arif. (2002). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. PT Pustaka Cidesindo: Jakarta.
- Satria, Arif. (2003). Konflik Nelayan Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Masyarakat*. vol. II. No. 2, Agustus 2003, ISSN;1412.6192: Jakarta.

Amiruddin Masri, M.Pd
Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Tadulako